



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 3
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat/ke-	: Audiensi / ke-1
Dengan	: Forum Lintas Agama Nasiyatul Aisyah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 20 November 2017
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H. ALI TAHER, S.H., M.Hum.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Mendengarkan masukan mengenai pencegahan stunting (gizi kronis) pada anak balita
Hadir	: 1. orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI 2. Peserta Forum Lintas Agama Nasiyatul Aisyah

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. M. Ali Taher, S.H., M.Hum. sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Audiensi Komisi VIII DPR RI bersama Forum Lintas Agama Nasiyatul Aisiyah untuk Mencegah Stunting dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis pada anak balita disebabkan oleh faktor kekurangan gizi pada saat ibu hamil dan hingga anak 1000 hari kelahiran. Efek Stunting akan berdampak jangka panjang, baik faktor tumbuh kembang, ekonomi, sosial, maupun bidang lain pada anak di masa depan.
2. Upaya mengatasi stunting perlu keterlibatan semua pihak secara lintas sektoral. Dalam proses ke arah tersebut, diharapkan masalah stunting dapat masuk sebagai salah satu fokus kerja parlemen, terutama untuk menjaring aspirasi dari masyarakat mengenai masalah stunting.
3. Kasus stunting banyak terjadi pada masyarakat di wilayah pedesaan dan yang berpendidikan rendah, yaitu sebanyak 41,8%. Selain itu, stunting juga dipengaruhi oleh pernikahan anak usia dini. Terkait hal itu, diperlukan dukungan dari DPR dan Pemerintah terutama untuk merevisi perundang-undangan mengenai pernikahan anak di usia dini.
4. Diperlukan sosialisasi yang lebih massif mengenai masalah stunting dimulai dari meningkatkan keterlibatan keluarga, penyuluhan pada pasangan pra-nikah (calon pengantin), dan upaya lain.
5. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar ada komunikasi dan kerjasama yang nyata dan intensif antara Forum Lintas Agama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, Bappenas, untuk mencegah masalah Stunting.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.15 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

DR. H.M. ALI TAHER, S.H., M. Hum.